

**Membangun ASN Moderat:
Internalisasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama dalam Menangkal Ekstremisme
di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu**

Antis Martin Christianti ¹, Asnaini ²

UPTD Pelatihan Kesehatan Dinkes Provinsi Bengkulu ², UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
christiantantis@gmail.com, asnaini@mail.uinfasbengkulu.ac.id

Received : 30-09-2024 Revised : 14-03-2025 Accepted : 02-10-2025 Published on : 30-10-2025

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses internalisasi nilai-nilai moderasi beragama dalam membangun ASN moderat sebagai upaya menangkal ekstremisme di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan rancangan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Dinas Kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai moderasi beragama dilakukan melalui sosialisasi kelembagaan, keteladanan pimpinan, dan pembiasaan budaya kerja yang inklusif. Faktor pendukung internalisasi meliputi komitmen pimpinan, dukungan regulasi pemerintah, serta partisipasi aktif ASN dalam kegiatan pembinaan moderasi. Adapun hambatannya terletak pada rendahnya literasi digital keagamaan dan pengaruh media sosial yang memunculkan polarisasi ideologis. Penelitian ini menawarkan model pembinaan ASN berbasis *moderasi maqashidi*, yang memadukan nilai-nilai *wasathiyah Islam* dengan etika profesional ASN untuk mencegah ekstremisme di sektor birokrasi. Penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan teori internalisasi nilai moderasi di lembaga pelayanan publik dan memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah untuk membangun ASN moderat, humanis, dan adaptif terhadap keberagaman.

Kata kunci: *Moderasi Beragama, Internalisasi Nilai, ASN Moderat, Ekstremisme, Moderasi Maqashidi.*

Abstract : This study aims to analyze the process of internalizing religious moderation values in developing moderate civil servants (ASN) as a preventive effort against extremism within the Bengkulu Provincial Health Office. The research applied a descriptive qualitative approach with a case study design. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation involving civil servants within the institution. The findings indicate that the internalization of religious moderation values is implemented through institutional socialization, leadership role modeling, and the habituation of inclusive work culture. Supporting factors include leadership commitment, regulatory support, and active participation of ASN in religious moderation training programs. In contrast, the obstacles lie in the low level of digital religious literacy and social media influences that trigger ideological polarization. This study proposes a *maqashidi-based moderation model*, integrating Islamic *wasathiyah* principles with ASN professional ethics to prevent bureaucratic extremism. The study contributes theoretically to developing the internalization model of religious moderation within public institutions and provides practical recommendations for local governments to foster moderate, humanist, and diversity-sensitive civil servants.

Keywords: *Religious Moderation, Value Internalization, Moderate Civil Servant, Extremism, Maqashidi Moderation.*

Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai negara dengan tingkat keragaman yang tinggi, baik dalam agama, budaya, maupun etnis. Keberagaman ini menjadi kekayaan bangsa sekaligus tantangan dalam menjaga harmoni sosial dan memperkuat integrasi

nasional. Di tengah derasnya arus globalisasi dan penetrasi media digital, muncul berbagai ideologi keagamaan yang ekstrem dan intoleran yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan persatuan bangsa. Dalam konteks i`nilah konsep *moderasi beragama* menjadi sangat

relevan, karena menawarkan keseimbangan antara ketiaatan beragama dan penghargaan terhadap keberagaman. Konsep ini menolak sikap ekstrem, baik dalam bentuk liberalisme maupun radikalisme, dan mendorong umat beragama untuk mengambil posisi *tawassuth* (jalan tengah), *tasamuh* (toleransi), *i'tidal* (keadilan), dan *tawazun* (keseimbangan) sebagai prinsip hidup (Irawan et al., 2022).

Dalam konteks kenegaraan, moderasi beragama menjadi pondasi penting dalam memperkuat ketahanan ideologis bangsa. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama menjadikan moderasi beragama sebagai salah satu program prioritas nasional sejak tahun 2019, dengan tujuan membentuk masyarakat dan aparatur yang memiliki pemahaman keagamaan yang seimbang dan terbuka. Namun, dalam praktiknya, fenomena intoleransi dan ekstremisme masih ditemukan, termasuk di lingkungan birokrasi pemerintahan. Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pelaksana kebijakan publik dan representasi negara memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk menampilkan sikap moderat dalam setiap dimensi tugas dan pelayanan. ASN tidak hanya dituntut profesional secara teknis, tetapi juga diharapkan menjadi teladan dalam hal etika, moralitas, serta penghormatan terhadap keberagaman (Toreh, 2022). Ketika ASN gagal menunjukkan sikap moderat, maka birokrasi yang seharusnya menjadi alat pemersatu justru dapat menjadi sumber ketegangan sosial.

Dinas Kesehatan merupakan salah satu lembaga publik yang memiliki interaksi intens dengan masyarakat lintas agama dan latar belakang sosial. Dalam sektor ini, nilai-nilai moderasi beragama menjadi sangat penting karena berkaitan langsung dengan sikap empati, keadilan, dan pelayanan non-diskriminatif terhadap pasien. Rahayu et al. (2022) menjelaskan bahwa penerapan moderasi beragama di bidang kesehatan memiliki dimensi

kemanusiaan yang kuat, karena pelayanan kesehatan menuntut kesetaraan, rasa hormat terhadap martabat manusia, dan kolaborasi lintas profesi tanpa memandang keyakinan. Dengan demikian, internalisasi nilai-nilai moderasi beragama di lingkungan Dinas Kesehatan bukan hanya menjadi kebutuhan spiritual, tetapi juga kebutuhan institusional dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkeadaban dan berkeadilan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa proses internalisasi nilai-nilai moderasi beragama di lingkungan ASN masih menghadapi berbagai kendala. Pertama, sebagian ASN masih memahami moderasi beragama secara sempit, sebatas wacana moral tanpa penerapan konkret dalam perilaku kerja. Kedua, literasi multikultural ASN masih tergolong rendah, sehingga sensitivitas terhadap perbedaan agama dan budaya dalam pelayanan publik belum terbangun dengan baik (Panigoro & Panigoro, 2023).

Ketiga, pengaruh media sosial yang tidak terfilter telah memicu penyebaran ide ekstrem yang menyusup ke dalam pola pikir sebagian ASN. Hal ini diperkuat dengan temuan Toreh (2022) bahwa implementasi reformasi birokrasi di Indonesia masih belum sepenuhnya menekankan aspek nilai-nilai moderasi beragama dalam kode etik ASN. Kelemahan pada sisi internalisasi nilai ini menyebabkan potensi munculnya perilaku diskriminatif, intoleran, dan bias ideologis di kalangan aparatur negara.

Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan moderasi beragama yang telah dicanangkan pemerintah belum sepenuhnya efektif diimplementasikan di level daerah dan lembaga non-keagamaan (Mahmudah et al., 2025). Sebagian besar penelitian terdahulu tentang moderasi beragama lebih banyak berfokus pada lembaga pendidikan, pesantren, dan masyarakat sipil (Zaluchu et al., 2025), sementara penelitian tentang penerapan nilai moderasi di lingkungan birokrasi kesehatan masih sangat terbatas. Padahal, sektor kesehatan merupakan ranah yang

sangat strategis karena melibatkan interaksi sosial yang luas dan membutuhkan sensitivitas terhadap nilai kemanusiaan lintas agama. Di sinilah *gap* penelitian ini muncul: belum adanya model empiris yang menjelaskan bagaimana internalisasi nilai moderasi beragama dapat diimplementasikan secara sistematis di lingkungan ASN Dinas Kesehatan, terutama di Kota Bengkulu yang memiliki dinamika sosial dan budaya yang khas.

Dalam konteks ini, sejumlah penelitian terbaru memberikan arah solusi yang potensial. Zain et al. (2025) menegaskan bahwa pluralisme agama dan sikap *wasathiyah* merupakan dua fondasi utama untuk membangun toleransi dan keharmonisan di lingkungan kerja, sebagaimana ditemukan di Rumah Sakit Otak Dr. M. Hatta Bukittinggi. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai pluralisme dan moderatisme tidak hanya menciptakan suasana kerja yang kondusif, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan solidaritas sosial antarpegawai. Sementara itu, Giu (2025) melalui risetnya tentang *blended learning* pelatihan moderasi beragama bagi ASN menegaskan pentingnya pendekatan pelatihan yang inovatif dan berkelanjutan berbasis teknologi agar ASN dapat memahami dan menginternalisasi nilai moderasi secara efektif. Penelitian-penelitian tersebut memperlihatkan bahwa internalisasi nilai-nilai moderasi beragama membutuhkan sinergi antara pendekatan edukatif, kultural, dan struktural.

Selain aspek pendidikan, pendekatan budaya organisasi juga memegang peranan penting. Panigoro & Panigoro (2023) menekankan bahwa literasi multikultural di kalangan ASN harus menjadi prioritas pembinaan aparatur agar mampu memahami teks keagamaan secara kontekstual, serta menumbuhkan kemampuan berinteraksi dengan keberagaman secara positif. Literasi ini, jika dikembangkan berbasis nilai Al-Qur'an dan Hadis, dapat menjadi strategi efektif

menghadapi tantangan intoleransi dan meningkatkan kompetensi ASN dalam pelayanan publik. Dengan demikian, penguatan literasi multikultural dan pelatihan berbasis moderasi beragama merupakan dua pilar penting dalam membangun ASN moderat di era digital.

Dari berbagai studi tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun sudah banyak upaya dilakukan untuk membumikan nilai-nilai moderasi beragama di Indonesia, sebagian besar masih bersifat normatif dan belum menyentuh level praksis, terutama dalam birokrasi daerah. Penelitian ini menawarkan *novelty* berupa pendekatan integratif antara moderasi beragama, literasi multikultural, dan etika pelayanan publik di lingkungan ASN Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu. Kebaruan penelitian ini juga terletak pada fokusnya terhadap sektor kesehatan sebagai locus internalisasi nilai-nilai moderasi beragama, sebuah bidang yang jarang disorot dalam kajian moderasi di Indonesia. Pendekatan ini memadukan prinsip *wasathiyah Islam* dengan etika profesional ASN dalam kerangka reformasi birokrasi menuju pemerintahan berkelas dunia sebagaimana digagas dalam *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025* (Toreh, 2022).

Urgensi penelitian ini semakin kuat ketika dikaitkan dengan fenomena meningkatnya potensi ekstremisme di lingkungan aparatur negara yang dapat mengancam netralitas dan profesionalisme ASN. Tanpa adanya pembinaan ideologis yang sistematis dan terukur, birokrasi dapat menjadi sasaran infiltrasi ide ekstrem yang membahayakan keutuhan negara dan kualitas pelayanan publik. Karena itu, penelitian ini penting tidak hanya untuk memperkuat landasan teoritis moderasi beragama dalam konteks birokrasi, tetapi juga untuk merumuskan model internalisasi nilai moderasi beragama yang aplikatif di lingkungan ASN Dinas Kesehatan. Model ini diharapkan mampu menghasilkan aparatur yang berintegritas, toleran, dan berorientasi pada kemanusiaan universal.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian berjudul “*Membangun ASN Moderat: Internalisasi Nilai-nilai Moderasi Beragama dalam Menangkal Ekstremisme di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu*” bertujuan untuk menganalisis bentuk dan proses internalisasi nilai-nilai moderasi beragama di lingkungan ASN, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya, serta merumuskan model pembinaan ASN moderat sebagai strategi preventif terhadap ekstremisme birokrasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan konsep moderasi beragama dalam konteks pelayanan publik, serta menawarkan rekomendasi kebijakan praktis bagi pemerintah daerah dalam membangun budaya kerja ASN yang moderat, inklusif, dan berkeadaban.

Rumusan Masalah

Bagaimana cara untuk Menginternalisasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama dalam Menangkal Ekstremisme di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu?

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan mendeskripsikan cara untuk Menginternalisasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama dalam Menangkal Ekstremisme di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, karena bertujuan memahami secara mendalam proses internalisasi nilai moderasi beragama pada ASN. Metode ini sesuai dengan pandangan Bogdan & Taylor dalam Miyarso (2011) bahwa pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami makna tindakan sosial secara kontekstual dan alamiah.

Lokasi penelitian berada di Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, dengan subjek penelitian para ASN dari berbagai bidang pelayanan. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi

dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas diperkuat melalui *triangulasi sumber* dan *member checking*.

Kajian Teori

1. Konsep Moderasi Beragama

Moderasi beragama secara etimologis berasal dari kata *moderate* yang berarti tidak berlebihan dan tidak ekstrem. Kementerian Agama RI (2021) mendefinisikan moderasi beragama sebagai cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang menempatkan diri di tengah-tengah, tidak ekstrem ke kanan atau kiri (Sumarto & Harahap, 2021). Moderasi beragama tidak berarti mengurangi keteguhan iman, tetapi menyeimbangkan antara komitmen keagamaan dan keterbukaan terhadap perbedaan sosial (Iffan et al., 2020). Yusuf al-Qardhawi menyebut moderasi sebagai *al-wasathiyah*, yakni posisi tengah yang adil dan proporsional dalam memahami teks agama (Zuhdi, 2021).

Iffan et al. (2020) menegaskan bahwa moderasi beragama bukan bentuk kompromi terhadap ajaran agama, melainkan upaya menyeimbangkan antara nilai ketaatan spiritual dan tanggung jawab sosial. Pendapat ini diperkuat oleh Abror (2020) yang menjelaskan bahwa moderasi beragama adalah prinsip keberagamaan yang menjunjung toleransi dan menghargai perbedaan tanpa meninggalkan ajaran pokok agama.

Moderasi beragama memiliki empat pilar utama, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penerimaan terhadap kearifan lokal (Ulinnuha & Nafisah, 2020). Dalam konteks birokrasi, moderasi beragama bukan hanya konsep teologis, tetapi juga etika sosial dan profesional. ASN yang moderat adalah mereka yang menjalankan agama dengan penuh tanggung jawab, menghargai keberagaman, dan menolak kekerasan atas nama agama (Cahyawati et al., 2025). Dengan demikian, moderasi beragama di

sektor publik menjadi fondasi etika kerja dan dasar penguatan integritas ASN.

2. Internalisasi Nilai-nilai Moderasi

Internalisasi nilai adalah proses penanaman nilai hingga menjadi bagian dari kepribadian seseorang. Menurut Miyarso (2011) internalisasi nilai adalah proses membawa nilai-nilai tertentu ke dalam diri individu hingga menjadi bagian dari kepribadiannya dan tercermin dalam perilaku sehari-hari. Proses ini tidak berhenti pada pengajaran nilai, tetapi memerlukan pembiasaan, keteladanan, dan lingkungan yang mendukung.

Menurut Fauziah (2024), pendidikan moderasi beragama perlu diinternalisasi secara komprehensif agar tidak berhenti pada aspek kognitif, melainkan menyentuh afektif dan psikomotorik ASN. Senada dengan itu, Cristiana (2021) menegaskan bahwa internalisasi nilai moderasi menuntut adanya lingkungan birokrasi yang suportif terhadap pluralitas dan anti diskriminasi.

Cahyawati et al. (2025) menambahkan bahwa internalisasi nilai moderasi dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman sosial reflektif. Pada ASN, internalisasi berlangsung melalui tiga tahapan: (1) pemahaman konseptual tentang moderasi; (2) pembiasaan nilai dalam interaksi sosial dan budaya kerja; (3) pembudayaan nilai dalam sistem kelembagaan. Dengan demikian, internalisasi nilai moderasi dalam ASN harus didekati melalui sistem manajemen nilai bukan sekadar seremonial keagamaan.

3. Moderasi Maqashidi dan Pencegahan Ekstremisme

Pendekatan *moderasi maqashidi* menekankan pada tujuan hukum Islam (*maqashid al-syari'ah*) yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan. Zuhdi (2021) dalam *Moderasi Maqashidi sebagai Model Kontra Ekstremisme* menjelaskan bahwa ekstremisme muncul karena interpretasi keagamaan yang literal tanpa mempertimbangkan maqasid syariah, yaitu kemaslahatan dan keadilan sosial. Amri

(2021) menambahkan bahwa nilai maqashidi menjadi basis untuk melahirkan sikap keagamaan yang terbuka, humanis, dan anti kekerasan.

Pendekatan maqashidi menekankan dimensi kemanusiaan dan keadilan universal, yang menjadikan agama sebagai sumber harmoni, bukan konflik. Model ini sejalan dengan hasil penelitian Suprianto (2022), bahwa upaya menanggulangi ekstremisme harus melalui pendidikan dan internalisasi nilai-nilai moderat dalam birokrasi dan masyarakat sipil. Moderasi maqashidi menjadi pendekatan komprehensif yang dapat diterapkan dalam pembinaan ASN.

4. ASN Moderat dan Nilai Kebangsaan

Sumarto & Harahap (2021) menegaskan bahwa "ASN moderat adalah aparatur yang memiliki komitmen kebangsaan kuat, menghormati perbedaan, dan menolak segala bentuk kekerasan". ASN moderat tidak hanya profesional, tetapi juga menjadi teladan dalam penerapan nilai toleransi di tempat kerja.

(Panigoro & Panigoro, 2023) menambahkan bahwa literasi multikultural berbasis Al-Qur'an dan Hadis perlu menjadi dasar pembinaan ASN agar memiliki sensitivitas terhadap keragaman sosial. Dengan demikian, ASN moderat berperan strategis dalam menjaga harmoni sosial dan memperkuat semangat kebangsaan di lingkungan birokrasi publik.

Hasil dan Pembahasan

1. Proses Internalisasi Nilai Moderasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses internalisasi nilai moderasi beragama di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu dilakukan melalui:

- a. Sosialisasi kelembagaan, seperti pelatihan ASN tentang nilai moderasi dan toleransi;
- b. Keteladanan pimpinan, di mana kepala dinas menampilkan perilaku adil dan terbuka; dan

- c. Pembiasaan budaya kerja inklusif, melalui kegiatan bersama lintas agama.

Hal ini sejalan dengan temuan Miyarso (2011) bahwa pembentukan karakter berbasis nilai hanya efektif jika disertai pembiasaan dan keteladanan lingkungan.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat

- a. Komitmen pimpinan terhadap program moderasi beragama

Komitmen pimpinan lembaga sangat menentukan keberhasilan internalisasi nilai-nilai moderasi beragama. Dalam konteks kelembagaan pemerintah, pemimpin berperan sebagai penggerak kebijakan sekaligus teladan bagi bawahannya dalam mengimplementasikan nilai toleransi dan kebangsaan. Menurut Hidayat et al. (2021), moderasi beragama harus diwujudkan secara nyata melalui kepemimpinan yang menegakkan prinsip *rahmatan lil 'alamin*, keadilan, dan keseimbangan dalam mengambil keputusan publik. Pemimpin yang moderat tidak hanya mengarahkan ASN untuk taat secara administratif, tetapi juga membangun kesadaran spiritual agar setiap kebijakan mencerminkan nilai kemanusiaan dan keberagaman.

- b. Dukungan regulasi seperti *Surat Edaran Kementerian PAN-RB No. 6 Tahun 2022* tentang Penguatan Wawasan Kebangsaan ASN

Regulasi menjadi instrumen penting dalam meneguhkan arah kebijakan moderasi beragama di kalangan ASN. Sebagaimana dikemukakan oleh Junaedi (2019) kehadiran pemerintah melalui kebijakan formal memperlihatkan komitmen negara untuk menanamkan nilai moderasi sebagai fondasi kehidupan beragama dan berbangsa.

Dalam konteks ini, regulasi seperti Surat Edaran PAN-RB No. 6 Tahun 2022 memperkuat semangat tersebut dengan menegaskan pentingnya wawasan kebangsaan, toleransi, dan anti-radikalisme

bagi ASN. Dukungan regulatif ini menjadi payung hukum agar setiap instansi memiliki pedoman yang seragam dalam menginternalisasi nilai-nilai kebangsaan dan keberagamaan secara moderat.

- c. Keterlibatan aktif ASN dalam kegiatan sosial dan pelatihan keagamaan moderat

ASN berperan strategis sebagai agen perubahan sosial yang dapat menularkan nilai moderasi melalui kegiatan sosial dan pelatihan keagamaan. Murad & Rizki (2022) menjelaskan bahwa pendidikan dan pelatihan berbasis moderasi merupakan sarana efektif untuk menekan radikalisme dan memperkuat budaya toleran di kalangan masyarakat. Kegiatan seperti *pelatihan moderasi beragama, diskusi lintas iman, serta keterlibatan ASN dalam aksi sosial kemanusiaan* merupakan bentuk praksis dari nilai *tawassuth, tawazun, dan i'tidal* dalam kehidupan bernegara. Keterlibatan aktif ini menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa keberagaman bukan ancaman, melainkan potensi bagi terciptanya harmoni sosial dan profesionalisme ASN yang berintegritas.

Sedangkan faktor penghambatnya adalah:

- a. Rendahnya literasi digital keagamaan

Rendahnya literasi moderasi digital menyebabkan ASN mudah terpapar konten ekstrem atau intoleran di media sosial (Tawaang & Mudjiyanto, 2021). Oleh karena itu, penguatan moderasi di kalangan ASN tidak cukup dengan pembinaan keagamaan konvensional, tetapi harus disertai penguatan kapasitas digital agar ASN mampu menyeleksi informasi keagamaan secara kritis dan proporsional.

- b. Adanya paham eksklusif di sebagian kecil ASN

Menurut Iffan et al. (2020), bahwa sebagian kecil ASN masih menunjukkan kecenderungan berpikir

eksklusif karena pengaruh pemahaman agama yang literal dan kurangnya literasi moderasi beragama. Selanjutnya, menurut Mukhibat et al. (2024), sikap eksklusif semacam ini muncul akibat lemahnya pendidikan reflektif dan dialog lintas nilai yang seharusnya menjadi bagian dari kurikulum moderasi ASN.

- C. Pengaruh media sosial yang sering menimbulkan polarisasi ideologis (Haris et al., 2021).

3. Model Pembinaan ASN Moderat

Model pembinaan yang dihasilkan dari penelitian ini terdiri atas tiga tahap:

- Tahap pemahaman: ASN diberikan pelatihan tentang nilai *wasathiyah* dan *maqashid syariah*;
- Tahap habituasi: pembiasaan perilaku toleran dalam pelayanan publik;
- Tahap refleksi: evaluasi dan apresiasi ASN berperilaku moderat.

Model ini selaras dengan pendekatan *Moderasi Maqashidi* Zuhdi (2021) yang mengintegrasikan nilai keadilan, kemanusiaan, dan keseimbangan dalam praktik profesional ASN. Selain itu, Menurut Muary (2022) pembentukan ASN moderat harus menyentuh tiga ranah pembelajaran yaitu kognitif (pemahaman tentang nilai kebangsaan dan agama), afektif (penghayatan terhadap nilai kemanusiaan), dan psikomotorik (implementasi dalam pelayanan publik).

Kesimpulan

Pertama, internalisasi nilai-nilai moderasi beragama di lingkungan ASN Dinas Kesehatan Bengkulu dilakukan melalui sosialisasi, keteladanan, dan pembiasaan nilai moderat dalam budaya kerja. Proses ini membentuk perilaku ASN yang lebih toleran dan inklusif. Kedua, keberhasilan internalisasi sangat bergantung pada komitmen pimpinan, dukungan kebijakan, dan penguatan literasi moderasi beragama di kalangan ASN. Ketiga, model pembinaan ASN berbasis *Moderasi Maqashidi* terbukti relevan

sebagai strategi membangun ASN moderat yang mampu menangkal ekstremisme birokrasi dan memperkuat etika pelayanan publik berkeadilan.

Daftar Pustaka

- Toreh, A. F. (2022). Reformasi Birokrasi Dan Moderasi Beragama. 4(2).
- Abror, M. (2020). Moderasi Beragama Dalam Bingkai Toleransi: Kajian Islam dan Keberagaman. *RUSYIDAH: Jurnal Pemikiran Islam*, 1(2), 2723–4886. <https://doi.org/10.35961/rsd.v1i2i.174>
- Amri, K. (2021). Moderasi Beragama Perspektif Agama-Agama Di Indonesia. *Living Islam: Journal of Islamic Discourses*, 4(2).
- Cahyawati, U. D., et.al (2025). Religious Moderation In Art: A Comparative Study Between Surakarta And Cairo. 14(1). <https://doi.org/10.20961/jas.v14i1.98169>
- Cristiana, E. (2021). Implementasi Moderasi Beragama Dalam Mencegah Radikalisme. <https://prosiding.iahntp.ac.id>
- Fauziah, A. H. (2024). Rekonstruksi Konsep Moderasi Beragama: Pencegahan Perilaku Liberalisme Dan Sinkretisme Melalui Narasi Digital Habib Husein Ja'far. *Jurnal Penelitian Dan Pendidikan Agama Islam*, 2(1).
- Giu, A. R. (2025). Kompetensi Teknologi Informasi Peserta Pada Sistem Blended Learning Pelatihan Moderasi Beragama Bagi ASN di Kantor Kementerian Agama Kota Kotamobagu. 7(1).
- Haris, A., et.al (2021). *Reposisi, Redefinisi, dan Reaktualisasi Model Baru Integrasi Keilmuan dalam Membangun Kedewasaan Beragama*. LKis.

- Hidayat, R., et.al (2021). *Moderasi Beragama dan Kebangsaan*. Penerbit Buku Literasiologi. <http://literasikitaindonesia.com>
- Iffan, A., et.al (2020). Konseptualisasi Moderasi Beragama Sebagai Langkah Preventif Terhadap Penanganan Radikalisme Di Indonesia. *PERADA*, 3(2), 187. <https://doi.org/10.35961/perada.v3i2.220>
- Junaedi, E. (2019). *Inilah Moderasi Beragama Perspektif Kementerian Agama*. Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI.
- Mahmudah, S., et.al (2025). Resistance To Religious Moderation In Indonesian's Lower To Middle-Class Communities. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 13(2), 931–958. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v13i2.2011>
- Miyarso, E. (2011). Pengembangan Model Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Agama Sebagai Upaya Untuk Menangkal Potensi Terorisme Dan Gejala Disintegrasi Bangsa. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 16(1), 76–93.
- Muary, R. (2022). Penguatan Moderasi Beragama bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama dan Tokoh lintas Agama di Sumatera Utara. *Pelita Masyarakat*, 4(1), 62–75. <https://doi.org/10.31289/pelitamasyarakat.v4i1.7748>
- Mukhibat, M., et.al (2024). Development and evaluation of religious moderation education curriculum at higher education in Indonesia. *Cogent Education*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/2331186X.2024.2302308>
- Murad, A. N., & Rizki, D. (2022). Pengembangan Studi Moderasi Keagamaan Pada Pencegahan Radikalisme Di Indonesia: Pendekatan Tinjauan Sastra Sistematis. *POTENSI: Jurnal Kependidikan Islam*, 8(2).
- Panigoro, M. R., & Panigoro, M. R. (2023). Literasi Multikultural Di Kalangan ASN; Kunci Menghadapi Tantangan Keberagaman Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis. *El-Mizzi*, 2(1).
- Rahayu, R., et.al (2022). Implementasi Moderasi Ummat Beragama Dalam Bidang Ilmu Kesehatan, Sains dan Teknologi dimasa Pandemi Covid-19 Di Desa Silomlom Kec. Simpang Empat Kabupaten Asahan. *Jurnal Komunika Islamika*. 9 (2). <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/komunika>
- Sumarto, & Harahap, E. K. (2021). Pemahaman Nilai-Nilai Moderasi Beragama dan Kebangsaan Melalui Kegiatan Diklat Kementerian Agama RI dalam Muwujudkan ASN Moderat Studi di Balai Diklat Keagamaan BDK Palembang. *JURNAL LITERASIOLOGI*, 7(1).
- Suprianto, B. (2022). Ekstremisme dan Solusi Moderasi Beragama di Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Studi Agama*, 6(1).
- Tawaang, F., & Mudjiyanto, B. (2021). Mencegah Radikalisme Melalui Media Sosial How To Prevent Radicalism Through Social Media. *Majalah Ilmiah Semi Populer Komunikasi Massa*, 2(2).
- Irawan, T. C., Ismail, S., & Rohman, U. (2022). Moderasi Beragama dalam Islam di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(1).
- Ulinnuha, M., & Nafisah, M. (2020). Moderasi Beragama Perspektif Hasbi Ash-Shiddieqy, Hamka, Dan Quraish Shihab: Kajian atas Tafsiran an-Nur, al-Azhar, dan al-Misbah. *SUHUF*, 13(1), 55–76. <https://doi.org/10.22548/shf.v13i1.519>
- Zain, N. H., et.al (2025). Pluralisme Agama Sebagai Kunci Membangun Toleransi Di Lingkungan Kerja



Rumah Sakit Otak Dr. Drs. Hatta
Bukittinggi. *Jurnal Transformasi
Pendidikan Modern*, 6(3).
<https://ejournals.com/ojs/index.php/jtpm>

Zaluchu, S. E., et.al (2025). Conceptual reconstruction of religious moderation in the Indonesian context based on previous research: Bibliometric analysis. *Social Sciences and Humanities Open*, 11. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2025.101552>

Zuhdi, M. H. (2021). Moderasi Maqashidi Sebagai Model Kontra Narasi Ekstremisme Beragama. 20(1). <http://www.istinbath.or.id>